KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN
PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)

SEKSI KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

BIDANG TATA LINGKUNGAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2019

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Oleh karenanya hak kewajiban bagi seluruh warga dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan.

Salah satu faktor kunci untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah tersedianya data dan informasi lingkungan bagi seluruh pihak. Agar data dan informasi mengenai lingkungan hidup dapat tersedia dan terakses, pemerintah mengembangkan Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) sebagai pijakan untuk pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

DIKPLHD dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat dan menjadi bagian penting sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup untuk menjadi acuan kebijakan dan perencanaan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup. DIKPLHD ini juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik sehingga dapat menunjang pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai penghargaan bagi pemerintah daerah yang telah menyusun DIKPLHD serta *leadership* kepala daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara baik, setiap tahunnya Presiden Republik Indonesia memberikan apresiasi melalui penghargaan Nirwasita Tantra.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu dilakukan kegiatan penyusunan data dan analisis kualitas lingkungan hidup yang

menginformasikan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun penyusunan data dan analisis informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup ini akan tertuang dalam suatu Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang berpedoman kepada petunjuk teknis penyusunan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

a. Maksud

Adapun maksud dilakukan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Dokumen IKPLHD) Provinsi Sumatera Barat yaitu menyediakan data dan analisis informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Prov. Sumbar Tahun 2018 yang berguna bagi para pengambil kebijakan, masyarakat maupun investor dan tersedianya draft data informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup tahun 2019.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan dari penyusunan buku Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun/mengumpulkan data informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah dari kegiatan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 guna penyempurnaan penyusunan Buku Data IKPLHD Tahun 2018.
2. Menganalisis data tersebut dikaitkan dengan kebijakan yang di tetapkan oleh Pemerintah Provinsi pada tahun berjalan yang tersusun dalam Buku analisis IKPLHD Tahun 2018.
3. Mendistribusikan Dokumen IKPLHD Tahun 2018 kepada para pengambil kebijakan dan *stake holder* terkait.
4. Melakukan penyusunan draft data informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (Draft DIKPLHD) Tahun 2019.

c. *Sasaran*

Adapun sasaran dari penyusunan Dokumen IKPLHD tahun 2018 yang disusun tahun 2019 agar termanfaatkannya DIKPLHD sebagai referensi dalam penyusunan dokumen perencanaan provinsi maupun kabupaten/kota (RPJMD, RPJPD, RPPLH), dokumen lingkungan dan dokumen perencanaan lainnya.

1.3 Lokasi kegiatan

Lokasi kegiatan dalam rangka penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup adalah:

1. Instansi/lembaga teknis tingkat provinsi dan lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat serta instansi lingkungan hidup kabupaten/kota se-Sumatera Barat, dalam rangka pengumpulan data DIKPLHD Provinsi;
2. Instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dalam rangka pembinaan penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota tahun 2019;
3. Kegiatan juga meliputi penilaian dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (IKPLHD) kabupaten/kota tahun 2018 berdasarkan dokumen IKPLHD yang disampaikan oleh kabupaten/kota, yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Asal Sumber Dana

Sumber pendanaan dari segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Tahun 2019, dibebankan kepada DPA-OPD pada Kegiatan Seksi Kebijakan Wilayah dan Sektor Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 dengan alokasi dana sebesar Rp. 210.941.520,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah) rincian biaya sebagai berikut :

a. Belanja Alat Tulis Kantor	: Rp 3.221.000,-
b. Belanja Bahan Bakar Minyak	: Rp. 5.290.000,-
c. Seminar Kit Peserta Penjaringan isu	: Rp. 2.750.000,-
d. Belanja Spanduk Penjaringan isu	: Rp 600.000,-
e. Belanja Cetak	: Rp. 43.950.000,-
f. Belanja Penggandaan	: Rp. 49.478.500,-
g. Belanja Makan dan Minum Rapat	: Rp. 7.800.000,-
h. Belanja Makan dan Minuman Kegiatan	: Rp. 4.372.500,-
i. Belanja Perjalanan Dinas	
• Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	: Rp. 28.480.000,-
• Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	: Rp. 57.999.520,-
j. Belanja Jasa Konsultasi	
• Belanja Honorarium Non Pegawai	: Rp. 24.000.000,-
• Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber	: Rp. 42.000.000,-
• Belanja Jasa Moderator	: Rp. 1.000.000.-
Totai	**Rp. 210.941.520,-**

1.5 Organisasi Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Dokumen Informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup akan dilaksanakan oleh Tim penyusunan analisis, tim penilaian DIKPLHD 2018, tim pembinaan dan penyusunan draft data DIKPLHD 2019 akan ditetapkan melalui SK Gubernur Sumatera Barat dengan keanggotaan tim melibatkan instansi teknis terkait provinsi, internal DLH Prov. Sumbar, akademisi dan LSM.

BAB II

DATA PERENCANAAN

2.1. Data Dasar

Data-data penunjang yang dibutuhkan terkait pelaksanaan kegiatan ini dibagi atas 2 (dua) kelompok data, yaitu :

a. Data sekunder

Data sekunder yang dihimpun dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah pengumpulan data yang berasal dari dinas/instansi teknis Provinsi Sumatera Barat serta data yang berasal dari dinas/instansi teknis yang berada di kabupaten/kota se-Sumatera Barat.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung diperoleh dari hasil pemantauan lapangan, pengukuran, dan perhitungan oleh Dinas Lingkungan Hidup baik Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Pentaatan Hukum Lingkungan, UPTD TPA Sampah Regional serta Kesekretariatan (sub bagian kepegawaian dan sub bagian keuangan dan program).

2.1.1 Pengolahan Data

a. Data yang digunakan dan disajikan merupakan data yang paling mutakhir tersedia sesuai kondisi penyediaan data dan informasi.
b. Data yang berasal dari Dinas/Instansi Teknis terkait Provinsi/ Kabupaten/Kota di analisis dan dikompilasi sesuai dengan kebutuhan penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (IKPLHD).
c. Analisis data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (IKPLHD) dan ruang lingkup yang ditetapkan.

2.1.2 Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dokumen IKPLHD)

Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dokumen IKPLHD) meliputi pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, dokumentasi kebijakan, dan penyajian informasi dengan model D-P-S-I-R (*Driving Force – Pressure – State – Impact – Response*).

2.2. Standar

Pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup mempedomani petunjuk teknis sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1362/Setjen/Datin/PD/DTN.0/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 perihal Penyampaian Pedoman DIKPLHD.

2.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang - undang jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
9. DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

BAB III
RUANG LINGKUP

3.1. Capaian Tujuan

Capaian tujuan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 ini mencakup beberapa hal diantaranya :

1. Menghimpun/mengumpulkan data informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah dari kegiatan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 guna penyempurnaan penyusunan Data dan Analisis Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dokumen IKPLHD) Tahun 2018.
2. Menganalisis data tersebut dikaitkan dengan kebijakan yang di tetapkan oleh Pemerintah Provinsi pada tahun berjalan yang tersusun dalam Buku analisis Informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (Buku IKPLHD) Tahun 2018.
3. Mendistribusikan buku Penyusunan Data dan Analisis Kualitas Lingkungan (Buku IKPLHD) Tahun 2018 kepada para pengambil kebijakan dan *stake holder* terkait.
4. Melakukan penyusunan draf buku data informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (Buku Data IKPLHD) Tahun 2019 yang akan dimanfaatkan untuk penyusunan Buku Analisis Informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (Buku IKPLHD) Tahun 2019 yang penyusunannya dilaksanakan pada tahun 2020.
5. Melakukan penilaian Penyusunan Data dan Analisis Kualitas Lingkungan (Buku IKPLHD) kabupaten/kota Tahun 2018.
6. Melakukan pembinaan penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (buku IKPLHD) kabupaten/kota tahun 2019.

pengambil kebijakan, masyarakat maupun investor dan tersedianya draft data informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup tahun 2019.

3.3 Lingkup Kegiatan

Lingkup Kegiatan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dokumen IKPLHD) Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 meliputi :

a. Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dokumen IKPLHD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
b. Penilaian dan pembinaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dokumen IKPLHD) kabupaten/kota.
c. Penjaringan isu prioritas lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
d. Penyusunan Draf data informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (draf dokumen IKPLHD) Tahun 2019.

3.3.1 Ruang lingkup penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Dokumen IKPLHD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 meliputi:

a. Penyempurnaan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018.

   Lingkup penyempurnaan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 merupakan finalisasi draf buku data yang telah terhimpun pada tahun 2018. Adapun lingkup kegiatan meliputi :

   - Mengevaluasi draf data yang telah terhimpun pada tahun 2018
   - Melakukan pertemuan koordinasi penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka mengevaluasi data yang berasal dari instansi teknis terkait provinsi maupun data-data yang berasal dari kab/kota.

b. Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2018.

Adapun lingkup kegiatan dalam penyusunan ini meliputi :

- Konsultasi publik terkait penyusunan DIKPLHD tercermin dengan penyusunan isu prioritas lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat.
- Tim melakukan penulisan analisis DIKPLHD.
- Konsinyering penyusunan DIKPLHD untuk finalisasi penulisan analisis yang dilakukan oleh tim.
- Finalisasi penyusunan DIKPLHD.

3.3.2 Ruang lingkup penilaian dan pembinaan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkugan Hidup Daerah (DIKPLHD) kabupaten/kota

Adapun lingkup penilaian dan pembinaan yang akan dilakukan meliputi :

a. Penilaian Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dokumen IKPLHD) kabupaten/kota tahun 2018.
b. Pembinaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dokumen IKPLHD) direncanakan terhadap 19 kabupaten/kota tahun 2019.
c. Menjadi narasumber kegiatan DIKPLHD yang dilakukan oleh kabupaten/kota.

3.3.3 Penjaringan Isu Prioritas Lingkungan Hidup

Kegiatan penjaringan isu dilakukan dalam rangka penyampaian metoda penulisan dan penilaian sesuai Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penjaringan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar akan dilaksanakan selama 1 (satu) hari penuh bertempat di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Dengan narasumber dan peserta sebagai berikut:

a. Narasumber berjumlah sebanyak 3 orang narasumber daerah dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan akademisi. Materi berupa Petunjuk Teknis penyusunan data dan analisis Informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pelaksanaan penjaringan isu.

Adapun lingkup kegiatan dalam penyusunan ini meliputi :

- Konsultasi publik terkait penyusunan DIKPLHD tercermin dengan penyusunan isu prioritas lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat.
- Tim melakukan penulisan analisis DIKPLHD.
- Konsinyering penyusunan DIKPLHD untuk finalisasi penulisan analisis yang dilakukan oleh tim.
- Finalisasi penyusunan DIKPLHD.

3.3.2 Ruang lingkup penilaian dan pembinaan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkugan Hidup Daerah (DIKPLHD) kabupaten/kota

Adapun lingkup penilaian dan pembinaan yang akan dilakukan meliputi :

a. Penilaian Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dokumen IKPLHD) kabupaten/kota tahun 2018.
b. Pembinaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dokumen IKPLHD) direncanakan terhadap 19 kabupaten/kota tahun 2019.
c. Menjadi narasumber kegiatan DIKPLHD yang dilakukan oleh kabupaten/kota.

3.3.3 Penjaringan Isu Prioritas Lingkungan Hidup

Kegiatan penjaringan isu dilakukan dalam rangka penyampaian metoda penulisan dan penilaian sesuai Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penjaringan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar akan dilaksanakan selama 1 (satu) hari penuh bertempat di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Dengan narasumber dan peserta sebagai berikut:

a. Narasumber berjumlah sebanyak 3 orang narasumber daerah dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan akademisi. Materi berupa Petunjuk Teknis penyusunan data dan analisis Informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pelaksanaan penjaringan isu.

b. Peserta berjumlah 60 orang yang terdiri dari 1 orang utusan dari masing-masing 19 kab/kota dan 41 orang dari instansi terkait provinsi, LSM, Akademisi dan asosiasi usaha dll.

3.3.4 Ruang Lingkup penyusunan draft data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Buku IKPLHD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Lingkup kegiatan penyusunan draf buku data dokumen Informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (DIKPLHD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. Adapun kegiatan meliputi :

- Menghimpun data informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup tahun 2019 minimal data series 2 (dua) tahun terakhir yang meliputi:
  - ✓ Kondisi Lingkungan Hidup dan Kecenderungannya (7 media), meliputi: air, udara, lahan, kehutanan, laut, kebencanaan, sampah.
  - ✓ Sumber tekanan pencemaran (8 sektor), terdiri dari : industri, penduduk, pertambangan, pertanian/peternakan, rumah sakit & hotel, limbah B3, transportasi, energi.
  - ✓ Upaya pengelolaan lingkungan (5 kegiatan), meliputi: penghijauan, rehabilitasi, perizinan lingkungan, penegakan hukum, produk hukum
- Mengolah data informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup tahun 2019 sesuai dengan juknis penyusunan data yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1362/Setjen/Datin/PD/DTN.0/12/2018) tanggal 12 Desember 2018 perihal Penyampaian Pedoman DIKPLHD 2018.

3.4 Lingkup Metoda Pelaksanaan

Metoda pelaksanaan penyusunan data dan analisis kualitas lingkungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 meliputi :

1. Penyempurnaan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup tahun 2018 dilakukan dengan metoda pelaksanaan diantaranya

yang ditetapkan oleh KLHK, pertemuan koordinasi dalam rangka *cross check* data kabupaten/kota dengan OPD terkait Provinsi dan internal Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan data yang belum final.

2. Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup tahun 2018 mempedomani Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disusun dengan model analisis D-P-S-I-R (*Driving Force-Pressure-State-Impact-Response*).
3. Penilaian dan Pembinaan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup.

   Metoda pelaksanaan penilaian dokumen mengunakan metoda penilaian yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan metoda pembinaan dilakukan secara langsung ke instansi lingkungan hidup kabupaten/kota
4. Penjaringan Isu Prioritas

   Metoda pelaksanaan penjaringan isu prioritas dilakukan dengan sistem diskusi interaktif antara penyampai materi dengan peserta penjaringan isu dan mengunakan metoda metaplan serta skoring terhadap isu yang terjaring,
5. Penyusunan draft buku data dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup tahun 2019

   Penyusunan draft buku data tahun 2019 mempedomani Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disusun dan metoda penyusunan mengacu kepada petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (format tabel, sumber data, tahun data) dll.
6. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke kabupaten/kota,
7. Perjalanan dinas ke KLHK terkait dengan:
   - Pendampingan Kepala Daerah (Gubernur) dan Ketua DPRD untuk wawancara hasil DIKPLHD, serta penerimaan penghargaan Nirwasita Tantra.
   - Pembahasan pedoman/juknis penyusunan DIKPLHD yang baru dan koordinasi teknis terkait DIKPLHD.

3.5 Waktu Pelaksanaan

Rencana pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat secara rinci sebagaimana *time schedule* tentatif seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Time Schedule Jadwal Tentatif Rencana Pelaksanaan Kegiatan

Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat

No	Pelaksanaan Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Persiapan pelaksanaan kegiatan (Penyusunan PO, KAK dan SK Tim Supervisi) Bulan Januari s/d Februari 2019												
2.	Penyempurnaan draf buku data Tahun 2018												
3.	Penyusunan Buku Analisis IKPLHD Prov. Sumbar 2018 (Januari-April 2019)												
4.	Penjaringan Isu Prioritas Lingkungan Hidup DIKPLHD												
5.	Konsinyering penulisan analisis data dokumen IKPLHD Prov. Sumbar 2018												
6.	Pengiriman Buku IKPLHD 2018 ke Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mei 2019												
7.	Penilaian buku IKPLHD kab/kota 2018 Pertengahan Maret s/d awal Mei 2019												
8.	Rapat Hasil evaluasi buku IKPLHD Kab/Kota 2018 dan persiapan pembinaan penyusunan buku IKPLHD kab/kota 2019 (Bulan September 2019)												
9.	Pembinaan buku IKPLHD kab/kota 2019 Bulan September-November 2019												
10.	Rapat Awal penyusunan Draf DIKPLHD 2019												
11.	Penyusunan draft data DIKPLHD 2019 Bulan September-Desember 2019												
12.	Perjalanan Dinas												
13.	Rapat Finalisasi Draf Buku Data IKPLHD tahun 2019												
14.	Pembuatan Laporan Akhir Tahun 2019												

BAB IV
PRODUK

Output dari kegiatan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD) Tahun 2019 yaitu :

1. 40 (empat puluh) set Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, yang akan didistribusikan kepada pihak terkait untuk menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan/program/kegiatan ataupun untuk kepentingan lainnya (penelitian, dan sebagainya).
2. 1 (satu) buah Buku Draft Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
3. 1 (satu) buah Laporan Kegiatan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dokumen IKPLHD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

BAB V
PENUTUP

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD) sebagai penyediaan data dan informasi lingkungan hidup ini diharapkan dapat menjadi instrumen/pedoman yang berguna bagi pengambil kebijakan dan stakeholder terkait dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Sumatera Barat.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dokumen IKPLHD) Provinsi Sumatera Barat 2019 disampaikan kepada Ibu dan mohon persetujuannya.

Disetujui dan disahkan
Tanggal 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT	**KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN**
Ir. SITI AISYAH, M.Si	**YOSMIKE YUSRA, SE, M.SI**
Pembina Tk.I	Pembina
NIP. 19670928 199203 2 0c02	NIP. 19731129 199803 2 001

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

KEGIATAN
PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)

SEKSI KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

BIDANG TATA LINGKUNGAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2019

PETUNJUK OPERASIONAL
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2019

A. DATA-DATA

Nama SKPD	:	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
Urusan Pemerintahan	:	LINGKUNGAN HIDUP
Program	:	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Lokasi Kegiatan	:	19 kab/kota di Sumatera Barat.
Nama Kegiatan	:	**Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)**
Pengguna Anggaran		
Nama	:	Ir. SITI AISYAH, MSi
Jabatan	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Alamat	:	Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
Kuasa Pengguna Anggaran		
Nama	:	Yosmike Yusra, SE, M.Si
Jabatan	:	Kepala Bidang Tata Lingkungan
Alamat	:	Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		
Nama	:	Desrizal, ST
Jabatan	:	Kepala Seksi Kebijakan Wilayah dan Sektor
Alamat	:	Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
Bendahara		
Nama	:	Handri
Jabatan	:	Bendahara Pengeluaran
Alamat	:	Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
Tanggal Penerbitan DPA	:	
Jumlah Dana	:	Rp. 210.941.520,- (Dua ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah)
Maksud, Tujuan dan Sasaran Kegiatan	:	**A. Maksud Kegiatan** Menyediakan data dan analisis informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Prov. Sumbar Tahun 2018 yang berguna bagi para pengambil kebijakan, masyarakat maupun investor dan tersedianya draft data informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup tahun 2019;

B. Tujuan Kegiatan

1. Menghimpun/mengumpulkan data informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah dari kegiatan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 guna penyempurnaan penyusunan Buku Data IKPLHD Tahun 2018.
2. Menganalisis data tersebut dikaitkan dengan kebijakan yang di tetapkan oleh Pemerintah Provinsi pada tahun berjalan yang tersusun dalam Buku analisis IKPLHD Tahun 2018.
3. Mendistribusikan Dokumen IKPLHD Tahun 2018 kepada para pengambil kebijakan dan *stake holder* terkait.
4. Melakukan penyusunan draft data informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (Draft DIKPLHD) Tahun 2019.

C. Sasaran Kegiatan

Agar termanfaatkannya DIKPLHD sebagai referensi dalam penyusunan dokumen perencanaan provinsi maupun kabupaten/kota (RPJMD, RPJPD, RPPLH), dokumen lingkungan dan dokumen perencanaan lainnya

B. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD) PROVINSI SUMATERA BARAT

Pengguna Anggaran
Ir. SITI AISYAH, MSi
(Ka. Dinas LH Prov. Sumbar)

Kuasa Pengguna Anggaran
Yosmike Yusra, SE, M.Si
(Ka. Bidang Tata Lingkungan)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Desrizal, ST
(Kepala Seksi Kebijakan Wilayah dan Sektor)

Tim Penyusun DIKPLHD

1. OPD terkait Prov. Sumbar (Bappeda, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas ESDM, Dinas PUPR, DKP, Dinas PSDA, Dinas Kehutanan, Dinas TPHP, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Peternakan, Dinas Perkimtan)
2. BPS Prov. Sumbar
3. BPBD Prov. Sumbar
4. BMKG Koto Tabang
5. BMKG Sicincin
6. PSLH UNAND
7. PSLH UMSB
8. LSM

C. URAIAN KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD) PROVINSI SUMATERA BARAT

Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
	Volume	Satuan	Harga Satuan	
BELANJA LANGSUNG				**210.941.520**
BELANJA BARANG DAN JASA				**210.941.520**
Belanja Bahan Pakai Habis				**11.861.000**
Belanja alat tulis kantor				*3.221.000*
- Kertas folio 70 gr	7	rim	51.500	360.500
- Kertas kwarto 70 gr	8	rim	49.600	396.800
- Snelhecter Bufallo	30	buah	3.300	99.000
- Box file bahan plastik	10	buah	18.200	182.000
- Pena	20	buah	3.700	74.000
- Binder clip 155	15	buah	12.100	181.500
- Binder clip 260	15	buah	26.600	399.000
- Clip paper trigonal	15	kotak	30.200	453.000
- Toner laser jet Refill	3	buah	358.400	1.075.200
Belanja Bahan bakar minyak/gas sarana mobilisasi				*5.290.000*
- Bahan bakar minyak	1	ls	5.290.000	5.290.000
Seminar Kit Peserta				*2.750.000*
Seminar Kit Peserta penjaringan isu (50 orang)	55	buah	50.000	2.750.000
Belanja Peralatan/Perlengkapan Pakai Habis (Spanduk)				*600.000*
Spanduk Penjaringan isu (5 m x 2 x 1 kali)	10	m	60.000	600.000
Belanja Cetak dan Pengandaan				**53.428.500**
Belanja cetak				*43.950.000*
- Buku Laporan Utama DIKPLHD Tahun 2018 (40 buku hitam putih)	21.000	hal	500	10.500.000
- Buku Ringkasan Eksekutif DIKPLHD Tahun 2018 (40 buku hitam putih)	600	hal	500	300.000
- Buku Laporan Utama DIKPLHD Tahun 2018 (10 buku warna)	5.250	hal	6.000	31.500.000
- Buku Ringkasan Eksekutif DIKPLHD Tahun 2018 (10 buku warna)	150	hal	6.000	900.000
- Belanja Cetak Sertifikat DIKPLHD Terbaik Tingkat Provinsi + frame	5	buah	150.000	750.000
Belanja Penggandaan				*9.478.500*
- Fotocopy	10.810	lembar	350	3.783.500
- Jilid buku laporan tahunan kegiatan penyusunan DIKPLHD Tahun 2018	5	buah	29.000	145.000
- Jilid Buku Kulit Tebal DIKPLHD Tahun 2018	100	buku	55.500	5.550.000
Belanja Makanan dan Minuman				**12.172.500**
Belanja Makanan dan Minuman Rapat				*7.800.000*
- Makan minum rapat (30 org x 8 kali)	150	ok	31.000	4.650.000
- Snack kotak rapat (30 org x 8 kali)	150	ok	21.000	3.150.000

Belanja Makanan dan Minuman untuk Penjaringan Isu				*4.372.500*
- Makan minum rapat (60 org x 1 kali)	55	ok	37.500	2.062.500
- Snack kotak rapat (60 org x 2 kali)	110	ok	21.000	2.310.000
Belanja Perjalanan Dinas				**86.479.520**
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				*28.480.000*
Pembinaan dan Pengumpulan data DIKPLHD ke Kab/Kota				
Uang Harian:				18.080.000
- Eselon III/IV (1 org x 2 hr x 8 kali)	16	oh	500.000	8.000.000
- Gol III/II (2 org x 2 hr x 7 kali)	28	oh	360.000	10.080.000
Penginapan:				10.400.000
- Eselon III/IV (1 org x 1 mlm x 8 kali)	8	om	600.000	4.800.000
- Gol III/II (2 org x 1 mlm x 7 kali)	14	om	400.000	5.600.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				*57.999.520*
Konsultasi Teknis				57.999.520
Uang Harian:				18.900.000
- Eselon III/IV (1 org x 3 hr x 4 kali)	12	oh	900.000	10.800.000
- Eselon III/IV (1 org x 3 hr x 3 kali)	9	oh	900.000	8.100.000
Penginapan				11.596.000
- Eselon III (1 org x 2 mlm x 4 kali)	8	om	992.000	7.936.000
- Eselon IV (1 org x 2 mlm x 3 kali)	6	om	610.000	3.660.000
Transportasi				26.908.000
- Tiket pesawat Pdg - Jkt (7 org)	7	ot	2.952.000	20.664.000
Taxi Eselon III				
- Taxi DKI Jakarta PP (1 org x 2 kali x 4 kali)	8	ok	256.000	2.048.000
- Taxi Padang PP (1 org x 2 kali x 4 kali)	8	ok	190.000	1.520.000
Taxi Eselon IV				
- Taxi DKI Jakarta PP (1 org x 2 kali x 3 kali)	6	ok	256.000	1.536.000
- Taxi Padang PP (1 org x 2 kali x 3 kali)	6	ok	190.000	1.140.000
sisa				595.520
Honorarium PNS				**42.000.000**
Tenaga Ahli Penyusunan Buku Laporan dan Ringkasan Eksekutif DIKPLHD 2018	6	op	7.000.000	42.000.000
Belanja Honorarium Non Pegawai				**5.000.000**
Honorarium Narasumber Penjaringan isu				4.000.000
- Narasumber daerah Eselon II (1 org x 1 kali x 2 jam)	2	oj	750.000	1.500.000
- Narasumber pakar/praktisi (1 org x 1 kali x 2 jam)	1	o/kp	1.500.000	1.500.000
- Narasumber daerah Eselon III (1 org x 1 kali x 2 jam)	2	oj	500.000	1.000.000
Belanja jasa moderator	2	o/kp	500.000	1.000.000

D. INDIKATOR KINERJA PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD) PROVINSI SUMATERA BARAT

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
Masukan	Jumlah dana yang tersedia	Rp. 210.941.520,-
Keluaran	Jumlah buku DIKPLHD Prov. Sumbar yang dicetak Jumlah dokumen data IKPLHD 2018 Jumlah peserta penjaringan isu prioritas lingkungan Jumlah kab/kota yang ditetapkan sebagai penyusun DIKPLHD terbaik tingkat Prov. Sumbar	40 buku 1 draft 55 orang 5 kab/kota
Hasii	Persentase peningkatan jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	17,30%

E. TIME SCHEDULE KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD) PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Pelaksanaan Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Persiapan pelaksanaan kegiatan (Penyusunan PO, KAK dan SK Tim Supervisi) Bulan Januari s/d Februari 2019												
2.	Penyempurnaan draf buku data Tahun 2018												
3.	Penyusunan Buku Analisis IKPLHD Prov. Sumbar 2018 (Januari-April 2019)												
4.	Penjaringan Isu Prioritas Lingkungan Hidup DIKPLHD												
5.	Konsinyering penulisan analisis data dokumen IKPLHD Prov. Sumbar 2018												
6.	Pengiriman Buku IKPLHD 2018 ke Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mei 2019												
7.	Penilaian buku IKPLHD kab/kota 2018 Pertengahan Maret s/d awal Mei 2019												
8.	Rapat Hasil evaluasi buku IKPLHD Kab/Kota 2018 dan persiapan pembinaan penyusunan buku IKPLHD kab/kota 2019 (Bulan September 2019)												
9.	Pembinaan buku IKPLHD kab/kota 2019 Bulan September-November 2019												
10.	Rapat Awal penyusunan Draf DIKPLHD 2019												
11.	Penyusunan draft data DIKPLHD 2019 Bulan September-Desember 2019												
12.	Perjalanan Dinas												
13.	Rapat Finalisasi Draf Buku Data IKPLHD tahun 2019												
14.	Pembuatan Laporan Akhir Tahun 2019												

F. JADWAL DAN REALISASI FISIK/KEUANGAN KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Kegiatan	TRIWULAN I						TRIWULAN II					
		Jan		Feb		Maret		April		Mei		Juni	
		Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat	10	9.220.800	15	39.354.500	20	503.400	25	10.743.100	35	17.453.800	45	93.788.500

TRIWULAN III						TRIWULAN IV					
Juli		Agustus		Sept		Okt		Nov		Des	
Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
55	456.100	65	24.321.600	75	10.313.520	85	3.542.500	90	1.043.900	100	200.000